

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi disuatu negara sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik internal (domestik) maupun eksternal (global). Faktor-faktor internal, diantaranya adalah kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, sosial dan budaya, sistem politik serta peran pemerintah didalam ekonomi, sosial dan budaya, sistem politik serta peran pemerintah didalam ekonomi. Sedangkan, faktor-faktor eksternal diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.¹

Desa merupakan suatu kesatuan hukum, dimana masyarakat desa yang berkuasa dalam menjalankan pemerintahan desa.² Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara rill langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut Undang-undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber

¹ Tulus, T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 1.

² Yayuk Yulianti, Mangku Poernomo, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), 23.

daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup, kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan perekonomian desa.³

Kendala yang dihadapi Desa tidak hanya sumber daya manusia tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan, berbagai cara telah diterapkan oleh pemerintah dengan menyalurkan atau memberikan berbagai dana untuk program pembangunan desa sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Sekitar 65% jumlah penduduk hidup di daerah pedesaan, sisanya kurang lebih 35% jumlah penduduk menetap di daerah perkotaan. Jumlah desa di Indonesia mencapai sekitar 65.000 buah dan jumlah kabupaten dan kota sebanyak kurang lebih 375 buah.⁴

Banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan, namun kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan bagi Pemerintah, Pemerintah harus mampu mensejahterakan masyarakat dengan cara memanfaatkan sumber daya alam atau mengembangkan potensi dari desa tersebut. Desa memiliki banyak potensi yang wajib dikembangkan. Tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini dapat dikelola dengan baik maka akan membawa perubahan atas perekonomian desa, tentunya juga akan mensejahterakan masyarakat desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Pembangunan pada hakekatnya untuk kemandirian, contohnya pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah dalam membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pengembangan potensi yang dimiliki oleh pedesaan guna meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman potensi atau usaha pedesaan. Ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, meningkatkan perekonomian desa, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan

³ Maria rosa ratna sri anggraeni, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Kesejahteraan masyarakat pedesaan*, modus Vol.28(2);,2016, 155-167.

⁴ Rahardjo, Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),1.

pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan perekonomian desa, dengan tujuan dapat memberi peluang bagi kemampuan daerah dan desa sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat desa.⁵

Sebagai negara berkembang dengan masalah kemiskinan. Indonesia harus melakukan perubahan dan perbaikan untuk mengurangi kemiskinan. Dengan cara dilakukannya pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi diharapkan mampu memberikan output bagi masyarakat dan perekonomian akan bertambah.⁶ Tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita dari masyarakat tersebut. Tingkat pendapatan masyarakat dapat dijadikan cerminan dari tingkat kesejahteraan yang dapat dimiliki atau dinikmati oleh masyarakat.⁷ Kesejahteraan ekonomi bersifat lahiriah yang nyata dan dapat diukur dengan melihat kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸ Perekonomian telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Nabi Muhammad Saw memperkenalkan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu yang bersifat multidimensi/interdisiplin, komprehensif, dan saling terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dan juga ilmu rasional, dengan ilmu manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai *falah* (kebahagiaan).⁹ Suatu kondisi sejahtera (konsep pertama), yaitu terpenuhinya segala kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan dan kesehatan. Kesejahteraan masyarakat salah satu tujuan dari kegiatan pembangunan. Tujuan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁰

⁵ Irawan dan M. Suparmoko, *Ekonomika pembangunan*, (Yogyakarta: BFEE, 2002), 8.

⁶ *Ibid.*, 9.

⁷ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 56.

⁸ Tedy Dirhamsyah, *Ketahanan pangan kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Plantaxia, 2016), 23.

⁹ *Ibid.*, 91.

¹⁰ Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*, (Bandung: Unpad, Press, 2016), 39.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) diharapkan mampu menopang perekonomian masyarakat desa. Bumdes adalah lembaga yang memprioritaskan kepentingan masyarakat melalui partisipasi dalam penyediaan pelayanan sosial masyarakat desa. Tujuan utama dari Bumdes adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun intervensi Pemerintah terlalu besar. Akibatnya menghambat kreatifitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan roda ekonomi dipedesaan. Dimana sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi dipedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan bantuan Pemerintah. Jumlah Badan Usaha Milik Desa diseluruh Indonesia mencapai 53 ribu dari 74.910 desa.¹¹

Pemerintah harus mampu melakukan inovasi agar perekonomian desa bisa meningkat, pemerintah tidak saja memberikan modal akan tetapi harus mampu mendorong masyarakat desa yang lebih mandiri dan produktif. Begitu pula, dengan masyarakat desa harus bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk memajukan dan mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial, sehingga pada realitanya masalah yang ada didesa teratasi. Sebagian besar Badan Usaha Milik Desa masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Sebagian lagi malah tidak berkembang, mungkin karena kurang pemahaman mengenai BUMDES pada sebagian Kepala Desa dan Masyarakat.

Kabupaten Nganjuk memiliki banyak Badan Usaha Milik Desa disetiap Desa, namun hanya sebagian yang mampu mengembangkan BUMDES tersebut. Salah satunya di Desa Bareng Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk yang memiliki Badan Usaha Milik Desa ” BARENG LESTARI” yang masih terus berkembang. Lahirnya Badan Usaha Milik Desa ”BARENG LESTARI” kegagalan dari

¹¹<http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/#forward.>, tanggal 03 Februari 2019

GAPOKTAN yang ada di desa Bareng. Desa Bareng merupakan desa yang dikenal dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti tanaman cengkeh dan coklat. Dengan adanya BUMDES diharapkan mampu membantu masyarakat. Badan Usaha Milik Desa Bareng Lestari memiliki beberapa unit usaha yaitu:

1. Unit usaha sektor rill (Bidang Jasa pelayanan)
2. Unit usaha bidang konstruksi (penyewaan molen)
3. Unit usaha simpan pinjam
4. Unit Usaha Ternak Sapi

Dari unit-unit usaha di BUMDES Bareng Lestari sekitar 30 anggota simpan pinjam masih 10% dari seluruh jumlah penduduk Desa Bareng, di unit usaha lain dari BUMDES tersebut sudah 40%. Implementasi Badan Usaha Milik Desa di sejumlah daerah masih belum bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa karena pola pemanfaatan masih belum maksimal. Desa Bareng sebenarnya sudah berupaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tetapi banyak masyarakat belum tergugah untuk memanfaatkan adanya Badan Usaha Milik Desa.

Desa bareng telah mendirikan BUMDES guna meningkatkan pendapatan asli desa dan mensejahterakan masyarakat dengan adanya pembangunan mushola, MCK, rabat jalan dan kios-kios untuk pasar desa tetapi dengan adanya BUMDES di desa Bareng belum dapat mensejahterakan seluruh masyarakat. Keberadaan BUMDES belum bisa berjalan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa. Masyarakatnya pun sebagian tidak memanfaatkan keberadaan BUMDES BARENG LESTARI. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk lebih lanjut mengetahui peran dan kendala yang dihadapi oleh BUMDES dengan mengangkat judul penelitian : **“Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa**

(BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus di Badan Usaha Milik Desa Bareng Lestari Desa Bareng Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat ?
2. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan secara teoritis

Sebagai upaya dalam memberikan tambahan informasi dan mengembangkan keilmuan di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, mengenai Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam.

b. Kegunaan Praktisi

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, akan tetapi secara global memiliki konsentrasi yang berbeda, antara lain:

1. Skripsi, Nofitullah tahun 2018 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima” Skripsi ini membahas tentang bagaimana keberadaan Bumdes dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada program yang berbeda dan lembaga yang berbeda. Penelitian terdahulu dengan permasalahan eksistensi dari Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) itu sendiri dan penelitian terdahulu tidak ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

2. Skripsi, Ratna Azis Prasetya tahun 2016 Universitas Airlangga Surabaya dengan judul “Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran Badan Usaha Milik Desa. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menilai peran Bumdes untuk pembangunan dan pemberdayaan sedangkan penelitian ini peran terhadap kesejahteraan masyarakat dan penelitian terdahulu tidak ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Urutan serta sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam”** tersusun sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan bahasan awal yaitu mulai dari latar belakang rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan teori yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Pembangunan Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Kesejahteraan menurut Islam dan indikator kesejahteraan.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian seperti jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang akan di pakai peneliti dalam melakukan penelitian tersebut.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan hal-hal yang terkait dengan objek dalam penelitian, deskriptif penelitian dan responden, menganalisis hasil dari penelitian. Serta pembahasan dalam penelitian ini yakni **“Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

BAB V : Penutup

Bab ini memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.